

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI BALI KAB KLUNGKUNG PADA MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024 4-8 OKTOBER 2023



SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI 2023

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
BAB II	KONDISI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK	7
BAB III	ALOKASI ANGGARAN	11
BAB IV	LAPORAN KUNJUNGAN KERJA	
BAB V	PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik, pasa masa persidangan I tahun sidang 2022-2023 ke Provinsi Bali.

B. Dasar Kunjungan Kerja

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A,
 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3. Peraturan Tata Tertib DPR RI:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan
 - c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada Masa Reses.
- 4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Bali secara umum, dan Pemerintah Kabupaten Klungkung secara khusus.
- b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Menggali dan menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali secara umum, dan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

2. Tujuan

- a. Untuk mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pengelolaan program pembangunan di bidang sosial dan perlindungan anak di Provinsi Bali.
- b. Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kendala pengelolan program pembangunan di bidang sosial dan perlindungan anak.

D. Jadwal Kunjungan Kerja

NO	PUKUL	ACARA	KET
		Rabu, 4 Oktober 2023	
1.	06.00 WIB	Anggota Tim Berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal IA	
2.	07.00 WIB	Take Off menuju Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS)	Pesawat Super Airjet IU 234
3.	10.10 WITA	Landing di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS)	
4.	10.20 WITA	 Transit di VIP room Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS) 	
5.	11.00 WITA	Berangkat menuju Klungkung, Bali	
6.	12.00 WITA	Tiba di Kantor Bupati Klungkung	
7.	12.00–13.30 WITA	• Ishoma	Dikoordinasikan oleh protokol
8.	13.50–15.00 WITA	Pertemuan dengan Bupati Klungkung, Kadinsos Provinsi Bali, Kadinsos Kabupaten Klungkung beserta jajaran Tema: Pengelolaan Bantuan Sosial termasuk Jaminan Kesehatan	Dihadiri Eselon I/II Mitra Komisi VIII DPR RI
9.	15.00–16.00 WITA	Peninjauan rumah deret bantuan Kementerian Sosial RI di Klungkung	Dikoordinasikan protokol
10.	16.00 WITA	Menuju ke Hotel	Hotel Grand Prama Sanur
11.	17.00 WITA	Tiba di Grand Palace Hotel Sanur	
12.	19.00 WITA	Makan malam	Dikoordinasikan protokol
	1	Kamis, 5 Oktober 2023	
13.	06.00-08.30 WITA	Sarapan pagi di hotel	
14.	08.30 WITA	 Menuju ke tempat penitipan anak Mercy Indonesia (Jl. Intan Lc II Gg.IV No.1 Kelurahan Tonja) 	Dikoordinasikan protokol

NO	PUKUL	ACARA	KET
15.	09.00–10.00 WITA	Peninjauan lapangan di tempat penitipan anak Mercy Indonesia	Dikoordinasikan protokol
16.	10.00 WITA	 Menuju ke Graha Nawasena (rumah harapan disabilitas) Jl. Kamboja No. 4, Denpasar. 	Dikoordinasikan protokol
17.	10.30–11.30 WITA	Peninjauan lapangan di Graha Nawasena	Dikoordinasikan protokol
18.	11.30 WITA	 Menuju ke Yayasan Metta Mama Maggha (merawat bayi terlantar dan ditelantarkan), Jl. Gunung Lawu No. 30 Denpasar 	Dikoordinasikan protokol
19.	12.00–12.30 WITA	 Peninjauan di Yayasan Metta Mama Maggha (merawat bayi terlantar dan ditelantarkan) 	Dikoordinasikan protokol
20.	12.30–14.00 WITA	Ishoma	Dikoordinasikan protokol
21	14.00 WITA	Menuju ke Bandara I Ngurah Rai, Denpasar	Dikoordinasikan protokol
22.	14.30 WITA	Tiba di Bandara I Ngurah Rai, Denpasar	Dikoordinasikan protokol
23.	15.55 WITA	 Anggota Tim take off dari Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS) menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta 	Dengan Garuda, GA 411
24.	17.00 WIB	Tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta	
		Jumat, 6 Oktober 2023	
25	06.00-08.30 WITA	Sarapan pagi di hotel	
26	10.00–13.00 WITA	Mengumpulkan bahan laporan kegiatan kunker dari mitra Komisi VIII DPR RI	
	1	Sabtu, 7 Oktober 2023	
27	06.00-08.30 WITA	Sarapan pagi di hotel	
28	10.00-13.00 WITA	Rapat penyusunan laporan kegiatan kunker reses Komisi VIII DPR RI	
	I	Minggu, 8 Oktober 2023	
29	06.00-08.30 WITA	Sarapan pagi di hotel	
30	11.45 WITA	Tim Sekretariat take off dari Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS) menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta	

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

NOI	MOR			ED 4 1/01	2.00
URT	ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
1.	166	DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si	Wkl. Ketua/ Ketua Tim	PDIP	JABAR III
2.	107	LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A.	Wkl. Ketua	GERINDRA	JATIM II
3.	231	I.G. NGURAH KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si.	Anggota	PDIP	BALI
4.	203	MY ESTI WIJAYATI	Anggota PDIP		DIY
5.	225	M. HASBI ASYIDIKI JAYABAYA	Anggota	PDIP	BANTEN I
6.	154	I KOMANG KOHERI, S.E.	Anggota	PDIP	LAMPUNG II
7.	280	MOHAMMAD SALEH, S.E.	Anggota	P G	BENGKULU
8.	304	Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H.	Anggota	PG	JATENG IV
9.	298	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M.	Anggota	PG	JABAR IX
10.	98	ABDUL WACHID	Anggota	GERINDRA	JATENG II
11.	136	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si.	Anggota	GERINDRA	PAPUA
12.	14	H. MAMAN IMANUL HAQ	Anggota	PKB	JABAR IX
13.	564	Dr. Ir. H. NANANG SAMODRA, K.A., M.Sc.	Anggota	PD	NTB II
14.	529	Dr. H. ACHMAD, M.Si.	Anggota	PD	RIAU I
15.	413	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	Anggota	PKS	SUMUT II
16.	440	WISNU WIJAYA ADI PUTRA S.E.	Anggota	PKS	JATENG I
17.	509	H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.	Anggota	PAN	BANTEN II
18.	475	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.	Anggota	PPP	KALSEL I
19.	-	DICKY RACHMADI, S.A.P.	PL	H. KABAG SETKO	M VIII
20.	-	YUSUP KAMALUDIN	SE	KRETARIAT KOMI	SI VIII
21.	-	MARDIYANA	SE	KRETARIAT KOMI	SI VIII
22.	-	EDI HAYAT, S.Ag., M.A.	TE	NAGA AHLI KOM	ISI VIII
23.	-	KUNTO CATUR PANGESTU, S.H., M.H.	TE	NAGA AHLI KOM	ISI VIII
24.	-	INAH ROFIKOH	SE	KRETARIAT KOMI	SI VIII
25.	-	NADHEN IVAN, S.I.Kom.		METAKSOS DPR	RI

BAB II KONDISI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI DAN KABUPATEN KLUNGKUNG

A. Angka Kemiskinan

Berdasarkan data BPS tahun 2023, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2023 sebesar 4,25 persen, turun 0,28 persen poin terhadap September 2022 dan turun 0,32 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2023 sebanyak 193,78 ribu orang, turun 11,58 ribu orang terhadap September 2022 dan turun 11,90 ribu orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 3,77 persen, turun 0,35 persen poin dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 4,12 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2023 sebesar 5,50 persen, turun 0,08 persen poin dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 5,58 persen. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 turun sebanyak 10,00 ribu orang (dari 133,82 ribu orang pada September 2022 menjadi 123,82 ribu orang pada Maret 2023). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 1,59 ribu orang (dari 71,55 ribu orang pada September 2022 menjadi 69,96 ribu orang pada Maret 2023).

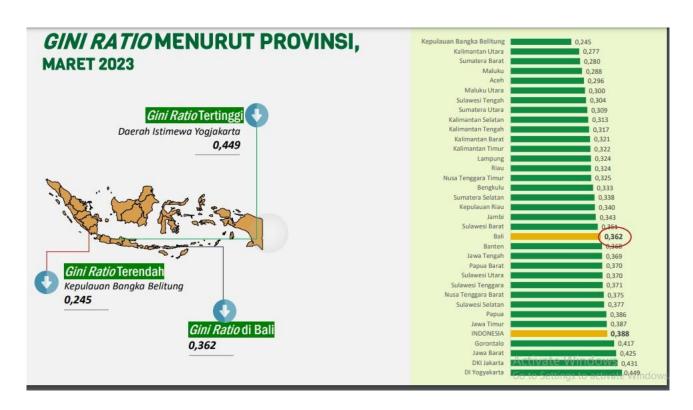
Sedang angka kemiskinan di Provinsi Bali berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana rilis data BPS tahun 2022, sebagai berikut:

Kabupaten/Kota			a de la companya de
TI TI	2020 ^{↑↓}	2021 🎞	2022
Kab. Jembrana	4,51	5,06	5,30
Kab. Tabanan	4,27	5,12	5,18
Kab. Badung	2,02	2,62	2,53
(ab. Gianyar	4,08	4,85	4,70
Kab. Klungkung	4,87	5,64	6,07
Kab. Bangli	4,19	5,09	5,28
Kab. Karangasem	5,91	6,78	6,98
(ab. Buleleng	5,32	6,12	6,21
Kota Denpasar	2,14	2,96	2,97
Provinsi Bali	3,78	4,53	4,57

Berdasarkan tabel di atas, maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, berdasarkan data BPS tahun 2022 adalah sebesar 6.07 %. Persentase ini masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Bali yang sebesar 4,57 %. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Klungkung perlu meningkatkan efektifitas pengelolaan program pengurangan kemiskinan, termasuk program bantuan sosial.

B. Ketimpangan

Angka ketimpangan (rasio gini) Provinsi Bali, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS pada bulan Maret 2023, dalah sebesar 0,362, sementara angka ketimpangan Indonesia, berdasarkan data yang sama, adalah sebesar 0,388. Artinya, angka ketimpangan Provinsi Bali masih lebih rendah dari angka ketimpangan Indonesia. Namun, apabila dibandingkan dengan angka ketimpangan di provinsi-provinsi lain, maka angka ketimpangan di Provinsi masuk dalam kategori menengah. Angka ketimpangan provinsi yang paling rendah adalah Provinsi Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,245, sementara angka ketimpangan provinsi yang paling tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,449. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali perlu meningkatkan pemerataan pembangunan di Provinsi Bali. Berikut grafik adalah angka ketimpangan Indonesia termasuk Provinsi Bali.



Angka ketimpangan Kabupaten Klunkung, Provinsi Balu, berdasarkan data BPS tahun 2022 adalah 0,3510. Angka ini masih lebih rendah dari angka ketimpangan Provinsi Bali pada tahun yang sama, yaitu sebesar 0,3630. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Klunkung perlu meningkatkan pengelolaan pembangunan yang memprioritaskan pemerataan. Berikut adalah tabel angka ketimpangan Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Klungkung.

		Gini Rasio Provinsi	Bali Menurut Kabupaten/Kot	a
Kabupaten/Kota	14	2020 1 2021 2		2022
Kab. Jembrana		0,3531	0,3170	0,3260
Kab. Tabanan		0,3239	0,3110	0,2990
Kab. Badung		0,3167	0,3320	0,3160
Kab. Gianyar		0,3171	0,3330	0,3070
Kab. Klungkung		0,3575	0,3460	0,3510
Kab. Bangli		0,2829	0,2850	0,2880
Kab. Karangasem		0,3268	0,3180	0,2970
Kab. Buleleng		0,2851	0,2820	0,2810
Kota Denpasar		0,3301	0,3750	0,3680
Provinsi Bali		0,3690	0,3780	0,3630

C. Kekerasan terhadap Anak

Berdasarkan data Kepolisian Daerah Bali tahun 2022, kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Bali sebanyak 260 kasus (kompas.com, 27 Februari 2023). Kekerasan yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Bali ini tentu hanya merupakan gunung es, artinya tidak menunjukkan data kekerasan yang sebenarnya. Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Bali kemungkinan besar lebih banyak dari data yang dirilis oleh pihak kepolisian.

Sedangan terkait dengan penanganan anak di Kabupaten Kelunkung, berdasarkan data tahun 2022, adalah sebagai berikut:

No	Program/Penanganan	Jumlah
1	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	2674
	usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan	
	ОТМ	
2	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	59
3	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	149
	terlantar dan gepeng yang dijangkau	
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	149
	terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai	
	standar gizi	
5	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	19
	terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	

D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM Provinsi Bali dan Kabupaten Klunkung, berdasarkan data BPS tahun 2022, adalah sebagai berikut:

and the second second	Indeks Pembangunan Manusi	ia Provinsi Bali Menurut Kabupal	ten/Kota
Kabupaten/Kota	2020 ^{↑↓}	2021 🕸	2022
Kab. Jembrana	72,36	72,75	73,58
Kab. Tabanan	76,17	76,45	76,75
Kab. Badung	81,60	81,83	82,13
Kab. Gianyar	77,36	77,70	78,39
Kab. Klungkung	71,73	71,75	72,55
Kab. Bangli	69,36	69,37	70,26
Kab. Karangasem	67,35	67,36	68,28
Kab. Buleleng	72,55	72,56	73,45
Kota Denpasar	83,93	84,03	84,37
Provinsi Bali	75,50	75,69	76,44

E. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang dihasilkan dengan mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG Provinsi Bali dan Kabupaten Klunkung tahun, berdasarkan data BPS tahun 2022, adalah sebagai berikut:

	Indeks Pembangunan Gender (I	PG) Provinsi Bali Menurut Kab	bupaten/Kota	
Kabupaten/Kota	2020 1	2021 ^{↑↓}	2022 ¹	
Kab. Jembrana	93,38	93,86	94,43	
Kab. Tabanan	95,36	95,42	95,45	
Kab. Badung	95,51	95,53	95,65	
Kab. Gianyar	94,63	94,70	94,72	
Kab. Klungkung	91,12	91,18	91,37	
Kab. Bangli	91,54	91,58	91,86	
Kab. Karangasem	88,93	88,96	89,90	
Kab. Buleleng	91,59	91,65	91,85	
Kota Denpasar	96,77	96,88	96,92	
Provinsi Bali	93,79	94,01	94,36	

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data di atas pembangunan berdasarkan gender di Kabupaten Klunkung, Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah sebesar 91,37. Angka ini masih di bawah IPG Bali yang sebesar 94.36.

BAB III

ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Bidang Sosial

ANGGARAN 2023

PAGU TOTAL Rp78.179.586.686.000,-

Unit	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	TOTAL
Sekretariat Jenderal	209.454.364.000	461.064.357.000	85.902.374.000	-	756.421.095.000
Inspektorat Jenderal	19.482.260.000	27.544.204.000		-	47.026.464.000
Ditjen Rehabilitasi Sosial	266.286.074.000	839.087.653.000		123.230.200.000	1.228.603.927.000
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	22.666.278.000	1.640.914.270.000		28.931.360.984.000	30.594.941.532.000
Ditjen Pemberdayaan Sosial	28.616.596.000	349.367.072.000		45.174.610.000.000	45.552.593.668.000
	546.505.572.000	3.317.977.556.000	85.902.374.000	74.222.201.184.000	78.179.586.686.000

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

PROGRAM KELUARGA HARAPAN : 28.709.816.300.000
PROGRAM SEMBAKO : 45.120.000.000.000

D. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(dalam ribuan rupiah)

	(aatam maam aptam)					
No	Satuan Varia	Program Dukungan Manajemen				TOTAL
NO	Satuan Kerja	Operasional	Non Operasional	Jumlah	(Non Operasional)	IOIAL
1	Sekretariat Kementerian	112.682.349	28.768.098	141.450.447	-	141.450.447
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	2.760.382	1.139.618	3.900.000	20.990.000	24.890.000
3	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	2.348.278	1.651.722	4.000.000	20.100.000	24.100.000
4	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	2.167.046	500.000	2.667.046	10.729.117	13.396.163

No	Satuan Kerja	Program Dukungan Manajemen			Program KGPPA	TOTAL
4	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2.970.262	1.250.000	4.220.262	28.800.960	33.021.222
6	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	4.234.636	900.000	5.134.636	32.400.885	37.535.521
7	Komsi Perlindungan Anak Indonesia	8.457.123	1.755.005	10.212.128	3.798.004	14.010.132
		135.620.076	35.964.443	171.584.519	116.818.966	288.403.485

BAB IV LAPORAN KUNJNUGAN KERJA RESES KABUPATEN KLUNGKUNG

Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses pada tanggal 4 - 8 oktober 2023 pada wilayah Bali khususnya Kabupaten Klungkung dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ibu Diah Pitaloka S.Sos., Msi., pada kehadirannya rombongan tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI disambut oleh Sekretaris Daerah. Pada pembukaan kunjungan kerja reses di Kabupaten Klungkung terlebih dahulu menjelaskan latar belakang kabupaten klungkung, program yang terlaksana dan cakupan bantuan sosial yang diterima dari pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut;

Latar belakang kabupaten klungkung dengan kondisi geografis yang terdiri dari daratan dan kepulauan dengan luas wilayah yaitu dengan total luas 315km dengan 64,8% merupakan wilayah kepulauan Nusa Penida dan 35,2% didaratan. Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 53 desa dengan jumlah penduduk sebesar 217,469 jiwa yang terdiri dari 57,979 kk. Dari data DTKS terdapat warga yang kondisi rumahnya tidak layak huni namun tidak dapat dibantu program pemerintah karena lahannya milik orang lain, sebagian warga DTKS tersebut harus sewa rumah karena telah tergusur akibat lahan yang dimanfaatkan pemiliknya.

	Cakupa										
		TAHAP 1 TAHUN 2023					TAHAP 2 TAHUN 2023				
мо	KECAMATAN	SP2D SEMBAKO		SP2D PKH		SP2D SEMBAKO		SP2D PKH			
	RECAMAIAN	JML KPM	NOMINAL	JML KPM	NOMINAL	JML KPM	NOMINAL	JML KPM	NOMINAL		
1	BANJARANGKAN	1,493	895,800,000	1,427	1,468,100,000	1,473	883,800,000	1,420	1,455,475,000		
2	DAWAN	1,351	810,600,000	1,204	1,124,625,000	1,332	799,200,000	1,204	1,119,950,000		
3	KLUNGKUNG	1,816	1,089,600,000	1,625	1,517,300,000	1,793	1,075,200,000	1,638	1,522,650,000		
4	NUSA PENIDA	4,034	2,420,400,000	2,815	2,505,000,000	3,999	2,397,600,000	2,864	2,536,512,000		
JUMLAH TOTAL		8,694	5,216,400,000	7,071	6,615,025,000	8,597	5,155,800,000	7,126	6,634,587,000		

Cakupan Bansos PKH BPNT

		TAHAP 3 TAHUN 2023							
NO	KECAMATAN	SP2I	SEMBAKO	SI	P2D PKH				
		JML KPM	NOMINAL	JML KPM	NOMINAL				
1	BANJARANGKAN	1,415	849,000,000	1,313	1,337,650,000				
2	DAWAN	1,282	769,200,000	1,119	1,025,700,000				
3	KLUNGKUNG	1,719	1,031,400,000	1,519	1,405,600,000				
4	NUSA PENIDA	3,892	2,335,200,000	2,712	2,354,987,000				
JUMLAH TOTAL		8,308	4,984,800,000	6,663	6,123,937,000				

Bantuan Lansia, ODGJ dan Disabilitas

Tahun 2023 (APBD Kabupaten)

МО	KPM Bantuan	Jumlah KPM	Realisasi Anggaran
1	Disabilitas	50	
2	Lansia	40	Rp.324.000.000
3	ODGJ	40	



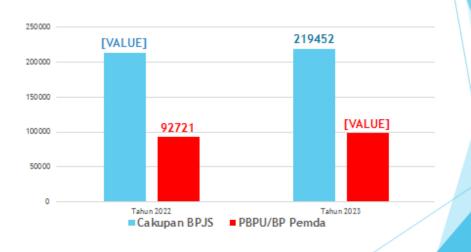
Permakanan Lansia 2023 Sebanyak 62 KPM



Cakupan Jaminan Kesehatan

١	10	Tahun	Cakupan BPJS Keseluruhan	Realisasi Angaran	
	1	2022	213.934 jiwa	92.721 jiwa	Rp. 45.240.518.912
	2	2023	219. 452 jiwa	98.321 jiwa	Rp. 46.281.229.312

Cakupan Jaminan Kesehatan



REKAP REALISASI PROGRAM BEDAH RUMAH DAN REHAB RUMAH KABUPATEN KLUNGKUNG DARI TAHUN 2013 - 2023

				BEDAH (UNIT)			REHAB (UNIT)			
NO	TAHUN	BEDAH KAB. KLUNGKUNG	BEDAH PROVINSI BALI	BEDAH CSR	BEDAH BKK BA DUNG	TOTAL	REHAB KAB KLUNGKUNG	RTLH KEMENSOS RI	TOTAL	
1	2013	8	118			126			0	
2	2014	250	110	17		377			0	
3	2015	173	89	18		280			0	
4	2016	175		16		191			0	
5	2017	165		1		166	485		485	
6	2018	96	37	2		135	125		125	
7	2019	111	6	14	243	374	219	150	369	
8	2020					0			0	
9	2021	109		2		111	189	200	389	
10	2022	70				70	58	210	268	
11	2023	38				38	42		42	
		TOTAL BEDAH 1.868 TOTAL REHAB						REHAB	1.678	
	TOTAL BEDAH DAN REHAB							3.546		



Identifikasi Penerima Bantuan





Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung bertujuan melakukan pembangunan kawasan perumahan bagi masayarakat dalam DTKS terdampak tidak memiliki lahan untuk rumah tinggalnya. Pola penghuniannya diberikan secara gratis. Kawasan perumahan tersebut menyediakan lahan yang dapat dimanfaatkan warga untuk dikelola secara individu maupun berkelompok. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta mampu mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

Pasar UMKM dibutuhkan untuk pemasaran produk lokal masayarakat dengan tujuan menarik wisatawan, disamping pemasaran secara offline juga dapat dilakukan dengan cara yang lain. Pembangunan infrastruktur pendukung lainnya juga dibutuhkan untuk menambah kwalitas lingkungan perumahan salah satunya pembangunan pengolahan sampah, tempat bermain dan membaca anak, SPALDT, toilet untuk publik, balai pertemuan dan tempat ibadah.







Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali dalam melakukan pendataan serta penyediaan lahan rencana rumah deret telah dilakukan. Pembangunan perumahan kami harapkan dapat dibantu Kementrian Sosial Republik Indonesia dalam program rumah deret dengan pemberdayaan masyarakat sosial.



Masyarakat yang akan menerima bantuan ini adalah masyarakat DTKS terdampak tidak memiliki lahan sendiri untuk rumah tinggalnya.

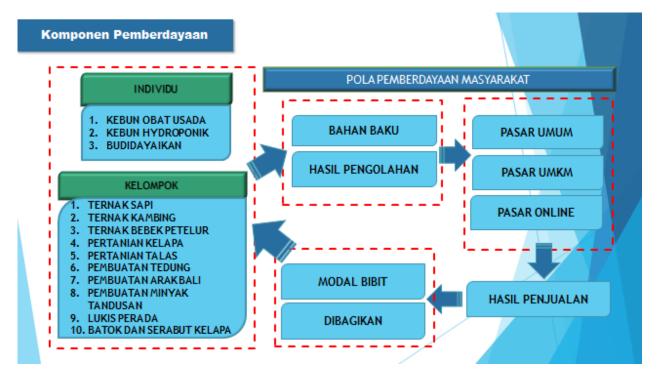


Komponen Pemberdayaan











RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

: RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN RUMAH DERET UNTUK PENINGKATAN KWALITAS HIDUP MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI LAHAN TINGGAL DI KABUPATEN KLUNGKUNG PROV. BALI KEGIATAN

LOKASI

: DESA SULANG - KECAMATAN DAWAN - KABUPATEN KLUNGKUNG - PROV. BALI

NO	URAIAN VOL		SAT	SAT HARGA SATUAN (Rp)		JUMLAH HARGA (Rp)		KET
1	RUMAH TIPE 36	65	UNIT	Rρ	85.000.000	Rp	5.525.000.000	Lahan 1are
2	KELENGKAPAN LAHAN GARAPAN	65	BH	Rp.	30.000.000	Rp	1.950.000.000	sesuai kebutuhan
3	PEK. JALAN LINGKUNGAN	5021	M2	Rp	176.000	Rp	883.696.000	beton
4	PEK, PAVING	915	M2	Rp.	224.000	Rp	204.960.000	tebal 6 cm
5	PEK. GOT DRAINASE	587	M	Pρ	380.000	Rp	223.060.000	
6	PASAR UMKM	1	UNIT	Pρ	400.000.000	Rp	400.000.000	
7	AREA BERMAIN DAN EDUKASI ANAK	1	UNIT	Rp	400.000.000	Rp	400.000.000	tempat bermain dan membaca
8	FASILITAS SOSIAL	1	UNIT	Pp	325.000.000	Rp	325.000.000	Tepat suci dan bangunan pendukung
9	HYDRANT	4	UNIT	Pp	45.000.000	Rp	180,000,000	
10	TOILET UMUM	1	UNIT	Pp	60.000.000	Rp	60.000.000	dibedakan laki-laki dan perempuan
11	TPS3R	1	UNIT	Rp.	400.000.000	Rp	400.000.000	sudah dengan alat
12	PAL KOMUNAL	1	UNIT	Pp	70.000.000	Rp	70,000.000	kapasitas 65 kk
13	PENATAAN RTH	1	Ls	Rp	672.500.000	Rp	672.500.000	disesuaikan
		NILAI TOTAL				Rp	11.294.216.000	

NB: Sudah dibantu dari Kemensos RI sebesar Rp.3.060.000.000 sehingga masih diperlukan anggaran kekurangan Rp.8.234.216.000



Rasio SDM PKH

No	Jabatan	SDM PKH	Kali Rasio Pendampingan (SDM PKH* 250)	Jumlah KPM PKH
1	SDM PKH di Kec.Klungkung	4	1000	1519
2	SDM PKH di Kec.Banjarangkan	5	1250	1313
3	SDM PKH di Kec.Dawan	3	750	1119
4	SDM PKH di Kec.Nusa Penida	3	750	2712
5	Koordinator Kabupaten	2	-	-
	TOTAL	17	3750	6663

NB: (Jumlah KPM PKH-Jumlah Rasio)

= 3750 - 6663 = (-**2913**)

Berdasarkan Rasio SDM Pendamping PKH dengan KPM Kab.Klungkung kekurangan sebanyak 11 Orang SDM Pendaming PKH terutama di Kec. Nusa Penida

Setelah paparan tersebut Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI meminta beberapa penjelasan mengenai pengelolaan kebijakan, anggaran, dan program tentang bantuan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan perlindungan anak, serta direspon langsung terkait Pengelolaan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang diperbarui dengan Peraturan No 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016. Khusus Dinas Sosial P3A Kab. Klungkung dalam penentuan kebijakan, anggaran, dan Program Bansos terlebih dahulu melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan unsur – unsur terkait, untuk anggaran menyesuaikan skala prioritas dan kemampuan daerah. Untuk pengelolaan kebijakan, anggaran dan program tentang perlindungan anak khususnya di UPTD PPA Dinsos P3A Kab. Klungkung sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan anak dan Peraturan Bupati Klungkung No 50 Tahun 2022 tentang pembentukan UPTD PPA berdasarkan regulasi tersebut UPTD PPA menggunakan anggaran dari Program Perlindungan Perempuan pada sub Penyediaan layanan rujukan lanjut bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan kordinasi kewenangan kabupaten kota, anggaran tersebut digunakan untuk penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di kabupaten Klungkung, sedangkan untuk program sosialisasi, pemenuhan hak di anak dan penguatan serta lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dikordinasikan dengan bagian perlindungan anak.

Pertanyaan selanjutnya mengenai sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan bantuan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan perlindungan anak terkait sinergitas dan kordinasi dengan pemerintah pusat senantiasa dilakukan dengan melibatkan Direktorat yang ada di Kementrian Sosial RI serta Deputi di Kementrian PPPA. Terkait dengan perlindungan anak di UPTD PPA Dinsos P3A Kab. Klungkung dengan pemerintah pusat berupa kordinasi tentang

kebijakan, upaya – upaya penanganan kasus dan perlindungan anak sesuai dengan standar yang dilakukan melalui forum WA group, beranggotakan seluruh UPTD PPA di Indonesia dan jajaran Kementrian P3A. sedangkan sinergitas dan kordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah dilakukan berupa penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di daerah (PERDA No 6 Tahun 2021) dan kordinasi tentang perencanaan dan pengelolaan anggaran dan sarpras dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan juga perlindungan anak, selain dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sinergitas dan kordinasi juga dilakukan dengan lembaga penegak hukum negara yang ada di Kabupaten Klungkung seperti Polres Klungkung, Kejaksaan dan Peradilan Negeri Semarapura.

Pertanyaan selanjutnya mengenai data yang dijadikan acuan dalam penentuan penerimaan bantuan sosial dan bagaimana proses verifikasi dan validasinya, hal tersebut dalam menentukan acuan penerimaan bantuan sosial mengacu pada Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan DTKS, Verivali pengusulan data DTKS dilaksanakan melalui musyawarah desa / kelurahan dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga Pemerintahan di Desa / Kelurahan selanjutnya data disampaikan melalui operator DTKS Desa ke Dinas Sosial untuk disahkan oleh Bupati dengan periode Verifikasi dan Validasi setiap bulan.

Lalu perihal penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan bagaimana pelaksanaannya, agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dilaksanakan pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan Operator DTKS setiap bulan, pemutakhiran yang dimaksud menyangkut validasi data kependudukan dan verifikasi kelayakan untuk mendapatkan bantuan sosial baik berupa sembako maupun program PKH. Khusus untuk verifikasi Program PKH senantiasa didampingi oleh SDM Pendamping PKH.

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) baik yang dikelola pemerintah atau masyarakat bagaiaman kuantitas dan kualitas mekanisme kerja, pembinaan, dan pengawasannya, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bentukan masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. LKS menyediakan pelayanan dalam bentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial untuk mengupayakan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialya, di Kabupaten Klungkung terdapat 7 LKS yang beroperasi pada tahun 2003, 4 berupa Panti Asuhan dan 3 Sekretariat. LKS tersebut menangani berbagai macam permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Klungkung mulai dari persoalan Fakir Miskin, orang terlantar dan kelompok difabel.

Komisi VIII DPR RI memperhatikan secara khusus terjadinya penelantaraan anak dan langkah – langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah guna menghadapi kejadian tersebut, sampai saat ini pemerintah Kab Klungkung belum pernah menangani penelantaran anak, jikapun terjadi kasus akan dilaksanakan penanganan yang mengacu pada standar operasional pelayanan dinas sosial P3A Kab. Klungkung yaitu melakukan Assesment serta tindaklanjut memfasilitasi permasalahan.

Peran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bantuan sosial, termasuk

jaminan kesehatan dan perlindungan anak, bantuan bedah dan rehab rumah dilaksanakan dengan cara swakelola pembangunannya dilaksanakan dengan cara swadaya. Sedangkan untuk pemenuhan jaminan kesehatan, masyarakat secara aktif melaporkan kepesertaan BPJS ke dinas sosial melalui dating langsung maupun melalui media sosial dan ada juga melalui usulan desa/ kelurahan dengan mengisi form 34 partisipasi masyarakat di kabupaten Klungkung dalam perlindungan anka contohnya pembentukan forum anak yang ada di masing – masing desa dimana forum anak sedniri di berdayakan untuk mensosialisasikan hak anak dan menjadi pelapor dan pelapor dalam kasus kekerasan anak, selain itu juga telah dibentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) serta Paralegal di desa yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan anak tanpa melalui hukum dan ikut melakukan perlindungan anak di wilayahnya.

Eksplorasi materi yang di gali oleh peserta kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI mengerucut pada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan bantuan sosial dan perlindungan anak serta bagaiaman langkah – langkah untuk menyelesaikannya, terkait kendala yang dihadapi adalah kurangnya SDM pendamping PKH karena selain berbagai tenaga Program PKH juga melaksanakan tugas pelayanan sosial lainnya, saat ini jumlah SDM Pendamping PKH sebanyak 17 orang terdiri dari 12 orang di Klungkung Daratan (mendampingi 3951 KPM) dan 4 orang di kepualauan nusa penida mendampingin 2712 KPM serta 1 orang Korkab sesuai dengan rasio kewilayahan topografi perbukitan serta masih terdapat wilayah blankspot di nusa penida perlu dilakukan penambahan SDM PKH sebanyak 11 orang 1 pendamping 250 KPM langkah yang dilakukan mengusulkan tambahan SDM Pendamping PKH ke Ditjamsos Kemensos RI kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Klungkung adalah kurangnya SDM professional, saat ini Dinsos P3A Kabupaten Klungkung tidak memiliki tenaga Peksos baik dari kementrian ataupun tenaga JF. Langkah yang sudah dilakukan adalah melakukan usulan tenaga peksos ke Ditjen Resos Kemensos RI.

Bahwa pada kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut;

- Komisi VIII DPR RI meminta Kementrian Sosial RI untuk memberikan hak anak panti mendapatkan Identitas;
- 2. Komisi VIII DPR RI meminta Kementrian Sosial RI untuk memberikan Program Indonesia Pintar bagi seluruh anak panti di Wilayah Republik Indonesia yang dikelola pemerintah dan masyarakat;
- 3. Komisi VIII DPR RI meminta Kementrian Sosial RI untuk memperbarui data penerima bantuan sosial serta kordinasi dengan pejabat setempat agar tersalurkannya penerima yang benar benar membutuhkan bantuan sosial tersebut.

BAB V PENUTUP

Demikian laporan untuk pelaksanaan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Bali. Harapannya, laporan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan rapat kerja yang diselenggarakan di Komisi VIII DPR RI dengan mitra terkait.

Ketua Tim Kunjungan Kerja

Hj Diah Pitaloka S.Sos., M.Si